

Prolog

Proxy War dan Kontestasi Negara-negara Timur Tengah

Smith Alhadar

Timur Tengah adalah kawasan paling vital di dunia disebabkan posisinya sebagai pemasok energi terbesar di dunia. Dari negara-negara Teluk saja kawasan ini memasok 20% energi dunia. Timur Tengah juga merupakan pembeli senjata terbesar di dunia. Ditambah konflik Arab-Israel berusia tujuh dekade yang sewaktu-waktu dapat pecah menjadi konflik militer terbuka di antara mereka, membuat Timur Tengah menjadi sasaran perebutan pengaruh negara-negara besar. Tetapi, di antara negara-negara Timur Tengah sendiri terjadi persaingan ketat untuk memperebutkan sumber ekonomi, pengaruh politik, dan supremasi militer dengan mengandalkan dukungan negara-negara besar. Saat ini ada tiga kubu yang bersaing ketat. Pertama, Poros Perlawanan yang terdiri dari Iran, Irak, Suriah, dan Hezbollah-Lebanon. Mereka juga bisa disebut sebagai kubu Syiah, karena mayoritas penduduknya beraliran Islam Syiah. Sampai tingkat tertentu mereka didukung Rusia dan Cina.

Kedua, Poros Kontra-Revolusi yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, dan Mesir. Mereka didukung AS dan Israel. Selama The Arab Spring pada 2011, Poros ini mendukung *status quo*, terutama penentangan mereka terhadap Islam politik,

dalam hal ini Ikhwanul Muslimin khususnya. Ketiga, Poros Pro-Perubahan yang terdiri dari Turki dan Qatar. Selama *The Arab Spring* mereka mendukung perubahan rezim dengan menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai motor. Ketiga Poros ini terlibat dalam perang proksi dan bersaing untuk mendapatkan supremasi politik dan militer di kawasan.

Sejak awal *The Arab Spring* di Suriah, tiga poros di atas telah ikut campur dalam perang saudara di sana. Iran mengirim tentara dan milisi Syiah ke sana untuk menyokong rezim Presiden Bashar al-Assad. Hezbollah yang dibentuk dan disokong Iran ikut mengirim pasukannya untuk berperang di sisi rezim untuk menghadapi kekuatan-kekuatan Islam radikal yang disokong Poros Kontra-Revolusi. Poros Pro-Perubahan juga membentuk proksi di sana untuk melawan rezim al-Assad. Milisi yang didukung merupakan kelompok nasionalis dan pro-Turki.

Sejak Rusia masuk pada 2015, keseimbangan kekuatan di Suriah berubah. Kini rezim Assad telah menguasai sebagian besar wilayah Suriah. Ia tinggal menghadap pemberontak di Provinsi Idlib di barat laut Suriah yang dihuni milisi Islam radikal dan milisi pro-Turki. Wilayah yang membentang dari Suriah utara sampai timur laut masih dikuasai milisi Kurdi dukungan AS. Namun, Unit Perlindungan Rakyat (YPG)—milisi Kurdi yang dibentuk dan dilatih AS—tidak berperang dengan rezim al-Assad. Mereka hanya ingin rezim memberlakukan otonomi di wilayah Kurdi.

Kendati ingin melihat rezim al-Assad jatuh, selama perang proksi, Washington lebih fokus pada perang melawan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Pada akhir 2018 ISIS dinyatakan telah kalah baik di Irak maupun Suriah, namun AS masih menyisakan 2.000 personel militer di Suriah untuk memastikan ISIS tidak bangkit lagi, membantu Kurdi mendapatkan otonomi dari rezim Assad, dan sebagai kartu tawar untuk mengenyahkan militer Iran dari Suriah. Penarikan tentara AS dari Suriah dijadikan syarat bagi dihalaunya Hezbollah dan

tentara Iran dari negara itu. Sementara sejak Iran bercokol di Suriah, Israel telah melancarkan operasi militer di negara itu, terutama Israel menyasar target-target militer Iran dan Hezbollah. Operasi Israel ini bisa dipahami mengingat Iran, Suriah, dan Lebanon adalah musuh bebuyutan Israel. Iran bahkan mengancam akan menggusur Israel hingga ke laut. Sementara Suriah dan Lebanon belum berdamai dengan Israel.

Untuk mencari solusi bagi perang proksi di Suriah, Turki-Rusia-Iran membentuk Poros Astana guna mengakhiri perang dan membentuk negara Suriah baru yang bersahabat dengan mereka meskipun ketiga negara ini memiliki tujuan berbeda di Suriah. Rusia ingin mempertahankan pangkalan angkatan lautnya di Tartus dan pangkalan udara di Khmeimim untuk menjaga kepentingannya di Timur Tengah. Turki ingin terbentuknya rezim baru di Suriah yang lebih demokratis dan menjaga kepentingan Turki di sana. Sebelumnya, rezim Assad mendukung Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang mengangkat senjata melawan Ankara sejak 1984. Iran ingin membangun jalan tol dari Teheran ke Beirut melalui Baghdad dan Damaskus untuk keperluan membangun bulan sabit Syiah di kawasan, sekaligus mengendalikan Israel.

Sementara itu, sejak Maret 2015, Poros Kontrarevolusi melancarkan perang di Yaman melawan milisi Houthi dukungan Iran. Houthi yang menganut Syiah mengendalikan wilayah Yaman utara. Pada awalnya Poros Kontrarevolusi berhasil memobilisasi 10 negara Arab untuk ikut berperang di Yaman. Tetapi, seiring perjalanan waktu, tinggal Arab Saudi dan UEA yang bertahan. Mundurnya sekian banyak negara disebabkan perang ini tidak populer di kalangan masyarakat Arab. Akibat perang, masyarakat di negara Arab termiskin di dunia ini mengalami kehancuran infrastruktur vital, kematian puluhan ribu rakyat sipil, kelaparan 18 juta dari total 26 juta penduduk, dan satu juta lainnya terserang penyakit kolera.

Kendati bersekutu, Saudi dan UEA punya tujuan berbeda di Yaman. Saudi ingin sekadar mengamankan halaman belakangnya dari pengaruh Iran, sementara UEA ingin mengontrol Kota Aden dan Selat Bab el-Mandeb, tempat lalu-lalang puluhan tanker yang mengangkut minyak dari Teluk ke Afrika, Eropa, dan AS. Iran sendiri menginginkan Saudi menguras energinya dan terperangkap dalam perang itu sehingga lalai terhadap manuver Iran di kawasan. Dalam perkembangannya, perang ini cenderung menguntungkan Iran dan UEA. AS, Inggris, dan Prancis yang memasok senjata ke Saudi—dan khususnya AS membantu logistik dan data intelijen—mendapat penentangan yang makin keras dari publik mereka. UEA berhasil membentuk Dewan Transisi Selatan, kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Yaman utara, kini berkuasa di Yaman Selatan setelah menggulingkan pasukan pemerintah di bawah Presiden Abdu Rabbuh Manour Hadi dukungan Saudi. Dengan menguasai Yaman saelatan berarti menguasai Pelabuhan Aden dan Bab el-Mandeb.

Kemudian, krisis Teluk pecah pada Juni 2017. Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir menerapkan blokade ke semua moda transportasi Qatar. Tujuannya membuat Qatar bertekuk lutut dan mengubah politik luar negerinya yang independen. Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme, campur tangan dalam urusan internal mereka, dan bersahabat dengan Iran. Sebagai syarat pencabutan sanksi, Qatar harus memenuhi 13 tuntutan mereka, di antaranya, menutup jaringan televisi Al-Jazeera yang paling banyak ditonton masyarakat Arab, mengusir tentara Turki dari pangkalan al-Udaid, berhenti mendukung teroris, dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Tentu saja Qatar tidak mendukung teroris, yang didukungnya adalah Ikhwanul Muslimin yang di sejumlah negara Arab seperti Yordania, Libya, dan Yaman merupakan partai yang sah. Memang Qatar berhubungan dengan Iran, tetapi ini lebih pada upayanya menjaga kepentingan nasionalnya. Qatar dan Iran membagi ladang gas bersama di Teluk sehingga mengharuskannya bekerja sama dengan

negara mullah itu. Pangkalan al-Udaid di Qatar memang menampung sekitar 1.000 tentara Turki, tapi ia lebih banyak menampung tentara AS, yakni tak kurang dari 10.000 personel. Banyak negara, termasuk AS, telah berusaha membujuk Saudi dan kawan-kawannya untuk mencabut blokade terhadap Qatar. Namun, sejauh ini tidak berhasil. Bagaimanapun, bukannya menyerah kepada musuh-musuhnya, Qatar malah memperkuat hubungannya dengan Iran dan Turki karena harus menggunakan wilayah udara Iran untuk memungkinkan Qatar dapat menerbangkan pesawat-pesawat sipilnya dan mendapat pasokan pangan dari kedua negara itu yang sebelumnya diimpor Qatar melalui Arab Saudi. Sedangkan adanya pasukan Turki di Qatar diharapkan menjadi faktor pencegah serbuan Saudi dan kawan-kawannya.

Hubungan Iran-AS memburuk sejak AS secara sepihak menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran yang diikuti serangkaian sanksi politik dan ekonomi yang sangat berat. Tujuannya menjatuhkan rezim mullah Iran atau paling tidak Iran bersedia merundingkan ulang JCPOA. Presiden AS Donald Trump menganggap kesepakatan itu cacat karena tidak mencakup pembatasan program rudal balistik Iran dan perangai Iran di kawasan. Poros Kontrarevolusi mendukung posisi AS, Poros Perlawanan menentang, dan Poros Pro-Perubahan mengambil sikap netral.

Penandatanganan JCPOA lain—Rusia, Cina, Inggris, Prancis, dan Jerman—tidak mendukung sikap AS dan berpegang teguh pada kesepakatan yang dianggap telah berhasil mengekang program nuklir Iran. Namun, bisa jadi Inggris, Prancis, dan Jerman berubah sikap kalau Iran terus mengurangi komitmennya pada JCPOA. Sebagaimana kita ketahui, hari-hari ini Iran meningkatkan pengayaan uranium hingga melebihi aras 3,67% dan meningkatkan stok uranium yang sudah diperkaya melebihi 300 kg sesuai JCPOA. Tujuannya meningkatkan tekanan pada Inggris, Prancis, dan Jerman agar membeli minyak Iran.

Memang JCPOA mengharuskan Iran membatasi program nuklirnya dengan imbalan Iran bisa mengeksport minyaknya ke pasar global. Namun, karena AS mengancam akan menjatuhkan sanksi pada negara atau perusahaan manapun yang masih berbisnis minyak Iran, penanda tangan JCPOA lain kesulitan untuk membantu Iran. Kita masih perlu menunggu dua bulan lagi sesuai jangka waktu yang diberikan Iran kepada penanda tangan JCPOA lain untuk berbuat sesuatu agar Iran bisa mengeksport minyaknya, kalau tidak Iran akan meningkatkan pengayaan uranium hingga 90% yang memungkinkannya membuat bom nuklir. Ini akan meningkatkan potensi perang Poros Perlawanan melawan Poros Kontrarevolusi.

Iran dan Saudi juga berkonflik di Lebanon. Iran mendukung Hezbollah yang punya wakil di parlemen dan Saudi mendukung faksi Sunni pimpinan PM Saad al-Hariri. Tahun lalu, Saudi menyandera Hariri ketika mengunjungi Riyadh untuk memaksanya mendepak Hezbollah dari pemerintahan. Sayang, manuver Saudi itu gagal. Adapun Irak tidak luput dari campur tangan Saudi dan Iran. Iran mendukung organisasi payung Hashid al-Shaabi, tempat milisi Syiah berkumpul, sementara Saudi mendukung faksi Syiah pimpinan ulama muda Muqtada al-Sadr yang memimpin Tentara Mahdi untuk menggembosi pengaruh Iran. Irak juga terbelah antara cengkraman Iran dan AS yang punya pasukan sekitar 5.000 personel. Usaha Iran membujuk Irak agar mengusir tentara AS sejauh ini tidak berhasil karena Irak masih membutuhkan dukungan AS dalam upayanya memerangi sisa-sisa ISIS, gerakan separatist Kurdi di Irak Utara, dan bantuan ekonomi AS.

Sementara itu, dalam konflik Israel-Palestina negara-negara Arab tidak lagi memberi prioritas pada isu Palestina. Ini konsekuensi dari perubahan persepsi Arab terhadap ancaman. Ancaman Iran kini dipandang lebih urgen ketimbang Israel. Malah, dalam rangka menghadapi Iran, negara-negara Arab Teluk makin mendekatkan diri dengan Israel. Sebaliknya, Palestina terabaikan. Poros Pro-Perubahan dan Poros Perlawanan mendukung Hamas dan Jihad Islami di Jalur

Gaza. Sedangkan Otoritas Palestina pimpinan Presiden Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat ditinggal sendirian.

Palestina kian lemah setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedubesnya ke sana, menghentikan bantuan kepada pengungsi Palestina, dan tidak lagi mengakui sekitar 5 juta pengungsi yang terserak di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon, kecuali beberapa ratus ribu saja. Ini untuk meloloskan apa yang disebut sebagai “Kesepakatan Abad Ini”. Memang selama ini isu Yerusalem dan pengungsi Palestina menjadi rintangan bagi terwujudnya perdamaian Israel-Palestina.

Konsep “Kesepakatan Abad Ini” yang digodok AS adalah rencana perdamaian Israel-Palestina di mana Palestina kehilangan Yerusalem Timur yang dicita-citakan menjadi ibu kota Palestina merdeka kelak, hilangnya hak pulang pengungsi Palestina ke kampung halaman mereka di Israel, dan wilayah Palestina yang tidak lagi berdasarkan perbatasan 1967. Palestina pun tidak berdaulat penuh, kecuali otonomi luas di Gaza dan sebagian Tepi Barat. Sejauh ini Palestina menolak konsep kesepakatan ini. Namun, Poros Kontra-Revolusi mendukungnya. AS akan segera meluncurkan rencana perdamaian ini pasca pemilu Israel pada 17 September mendatang. Diduga, Timur Tengah kembali membara saat AS meluncurkan rencana perdamaian yang melanggar seluruh resolusi DK PBB ini dan memupus mimpi Palestina mendirikan negara merdeka yang berdaulat penuh kelak.

Sebagai penutup, dalam konflik di Libya, Poros Kontrarevolusi mendukung pemerintahan di Libya timur yang berkedudukan di Tobruk pimpinan Jenderal Khalifah Haftar, sementara Poros Pro-Perubahan mendukung kubu Pemerintahan Persetujuan Nasional (GNA) dukungan PBB yang berkedudukan di ibu kota Tripoli, Libya barat. GNA didukung milisi-milisi Islam, di antaranya Ikhwanul Muslimin. Upaya Prancis, Italia, maupun PBB untuk mendamaikan pihak-pihak bertikai sampai sekarang belum membuahkan hasil.

Epilog

Analisis Faktor-faktor Pendorong Terjadinya *Proxy War* di Timur Tengah

M. Muttaqien

Gelombang demokratisasi yang terjadi di Timur Tengah yang diawali di Tunisia tahun 2011 kemudian bergeser ke Libya, Mesir, Maroko, Aljazair, Lebanon, Kuwait, Bahrain, dan krisis yang berlarut-larut akibat tuntutan perubahan rezim yang terjadi di Suriah dan Yaman yang terus berlangsung sampai dengan saat ini menyisakan persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Krisis yang terjadi merupakan akumulasi dari persoalan domestik, regional dan global. Persoalan domestik menyangkut relasi elite dan massa yang dibangun dari suatu sistem yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Keinginan dari elit penguasa yang ingin bertahan dan tuntutan perubahan dari kekuatan-kekuatan oposisi yang selama ini dikekang kebebasannya memunculkan kekerasan yang tidak berkesudahan. Dalam tataran regional, muncul kekuatan-kekuatan yang saling bersaing untuk berebut pengaruh di antara para pihak yang sedang bertikai, dan di tingkat global tidak dapat dipungkiri kawasan ini tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan kekuatan-kekuatan besar dunia sejak era Perang Dingin sampai dengan pasca Perang Dingin. Itulah sebabnya

perlu dibahas mengapa kawasan Timur Tengah selalu menjadi arena *proxy war* dari kekuatan-kekuatan besar dunia.

Di antara tipe-tipe perang dikenal adanya *civil war* (perang sipil) yaitu perang yang melibatkan faksi-faksi yang bertikai dalam satu negara. Para pihak yang bertikai berusaha membentuk atau mencegah terbentuknya pemerintahan baru baik untuk keseluruhan wilayah negara itu atau beberapa bagian dari wilayah negara tersebut. Tujuan dari faksi-faksi yang bertikai dapat berupa keinginan mengganti seluruh sistem pemerintahan yang ada, atau hanya mengganti orang-orang yang menduduki jabatan pemerintahan saat ini, atau memisahkan diri dari negara induk untuk membentuk negara baru. Perang sipil yang sangat dikenal dalam sejarah modern contohnya adalah Perang Sipil Amerika Serikat tahun 1860-an, perang pemisahan Eritrea dari Ethiopia, dan Perang Sipil di El Salvador.¹

Kawasan Timur Tengah juga menjadi ajang terjadinya beberapa perang sipil. Sejak *The Arab Spring* tahun 2011 setidaknya terjadi beberapa perang sipil, di antaranya perang sipil di Libya antara kubu Presiden Moammar Khaddafi dengan kekuatan oposisi yang tergabung dalam Transitional National Council (TNC), perang sipil di Suriah antara kubu Presiden Bashar al-Assad dengan kelompok-kelompok oposisi, perang sipil di Yaman antara pendukung Presiden Mansour Hadi berhadapan dengan kelompok Houthi yang berkoalisi dengan mantan Presiden Abdullah Shaleh, dan dua perang sipil yang memang sudah terjadi sejak sebelum meletusnya "*The Arab Spring*" yaitu perang sipil di Sudan antara Sudan Utara dan Sudan Selatan dan perang sipil di wilayah Kurdistan, terutama antara militer Turki dengan Partai Pekerja Kurdi.

Perang-perang sipil di era modern yang terjadi di negara dunia ketiga terutama setelah Perang Dunia II, memicu keterlibatan aktor luar yang mendukung salah satu pihak. Pada masa Perang Dingin, aktor-aktor luar yang terlibat dalam perang memberikan bantuan

1 J. S. Goldstein, 2006, *International Relation*. 7th Edition, New York: Pearson Longman: 201.

persenjataan, bantuan pelatihan dan akses informasi kepada pihak-pihak yang bertikai. Aktor utamanya adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet seperti yang terjadi di Perang Sipil di Nicaragua (1979-1990), Perang Afghanistan (1979-1989), dan Perang Vietnam (1957-1975). Model keterlibatan aktor luar dalam perang sipil semacam ini dikenal dengan istilah *proxy war*.²

Argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini adalah ketika sebuah negara memiliki limpahan sumber daya atau memiliki posisi yang strategis kendatipun miskin sumber daya, namun negara tersebut lemah secara politik dan militer; maka ketika terjadi konflik sangat potensial menjadi *proxy war* diantara kekuatan-kekuatan besar yang ada di sekitarnya. Kawasan Timur Tengah adalah contoh wilayah yang menjadi ajang *proxy war*. Kekayaan alam berupa minyak di satu sisi dan posisi geografik yang sangat strategis disisi yang lain membuat konflik yang bersifat domestik atau dikenal dengan istilah *civil war* dapat memicu keterlibatan kekuatan-kekuatan dari luar sehingga terjadi *proxy war* dalam konflik tersebut. Alasan lebih mendalam mengapa kawasan Timur Tengah selalu menjadi arena *proxy war* dianalisis sebagai diuraikan di bawah ini.

Salah satu faktor yang memicu munculnya *proxy war* di antara negara-negara di Timur Tengah adalah dominasi nasionalisme *quamiyya* atas *wathaniyya*. Drysdale (1985) menyebutkan bahwa di Timur Tengah terutama di negara-negara Arab berkembang dua model nasionalisme yaitu nasionalisme *qaumiyya* dan *wathaniyya*. Nasionalisme *qaumiyya* merujuk pada suatu paham kebangsaan yang menekankan kesamaan sebagai bangsa, dengan bahasa yang sama, dan ikatan sejarah yang sama. Secara umum mayoritas bangsa yang mendiami Timur Tengah adalah bangsa Arab yang memiliki kesamaan bahasa yaitu Bahasa Arab, dan pengalaman sejarah yang mereka lalui relatif sama terutama sejak kedatangan Islam, perkembangan

² *Ibid.*: 46.

peradaban dan kekuasaan Islam di wilayah ini, bahkan sampai dengan era penjajahan oleh bangsa Eropa.

Lawan dari nasionalisme *qaumiyya* adalah nasionalisme *wathaniyya*, yaitu paham kebangsaan yang didasarkan pada satu kesatuan wilayah politik yang diikat dengan kesamaan kewarganegaraan sebagai satu negara. Untuk mengembangkan model nasionalisme *wathaniyya* yang menjadi tantangan negara-negara Arab adalah menemukan apa yang dapat dibanggakan oleh masing-masing negara sebagai sebuah negara. Sejauh ini kebanggaan sebagai sebuah negara dibangun dengan melihat sejarah masa lampau, sementara di Timur Tengah khususnya di antara negara-negara Arab terbentuknya kesatuan politik yang bernama negara di kawasan ini relatif baru. Yang lebih dominan sejarah masa lalu negara-negara tersebut adalah sejarah panjang peradaban Islam yang berlangsung berabad-abad yang itu sudah membentuk ikatan tersendiri di antara mereka. Dengan kata lain, nasionalisme *qaumiyya* lebih dominan dibandingkan nasionalisme *wathaniyya*. Akibat yang muncul dari kuatnya nasionalisme *qaumiyya* adalah saling intervensi antarnegara Arab, terutama negara yang lebih kuat terhadap negara yang lemah, baik karena persaingan antar negara Arab maupun antara negara-negara Arab dengan negara-negara non-Arab. Pada titik ini ketika terjadi konflik diantara negara-negara Timur Tengah potensi munculnya *proxy war* sangat besar.

Di antara konflik di Timur Tengah yang sudah sangat jelas menjadi *proxy war* di antara kekuatan-kekuatan regional dan global adalah Konflik Arab-Israel. Sejak awal munculnya konflik ini, keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet ketika itu terlihat nyata. Perang Arab-Israel tahun 1948, 1954, 1967, dan 1973 tidak lepas dari persaingan di antara dua negara *superpower* tersebut. Bahkan pada Perang 1973 kejengkelan negara-negara Arab atas dukungan AS kepada Israel mendorong Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya menginisiasi embargo minyak atas AS dan negara-negara lain yang mendukung Israel. Persoalan

Konflik Arab Israel telah menjadi “*all Arabic core concern*”, bahkan terbentuknya Liga Arab pun juga dipicu oleh konflik ini. Hampir negara-negara Arab utama seperti Arab Saudi, Suriah, Irak, Kuwait dan bahkan negara non-Arab yaitu Iran memiliki jaringan dengan kelompok-kelompok perlawanan Palestina. Ketika PLO dan Israel telah menandatangani perjanjian damai bulan September 1993 dan muncul rivalitas domestik Palestina antara Fatah dan Hamas, campur tangan aktor-aktor eksternal untuk mendukung salah satu pihak juga muncul, yaitu Fatah didukung Arab Saudi dan Hamas didukung Qatar, Suriah, dan dua negara non-Arab (Turki dan Iran).³ Hal di atas menandakan adanya pengaruh nasionalisme *qaumiyya* atas *wathaniyya* yang diwujudkan dengan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di Palestina.

Faktor lain yang memicu terjadinya *proxy war* adalah konflik identitas. Hampir semua konflik di dunia ketika menyangkut hal-hal yang bersifat materi atau *tangible* sangat mudah untuk diselesaikan. Pada kenyataannya penyebab konflik tidak hanya hal-hal yang bersifat fisik atau materi, namun juga hal-hal yang bersifat *intangible*. Untuk model konflik yang terakhir ini dalam sejarahnya sulit untuk diselesaikan, seperti konflik yang disebabkan kebencian etnis, identitas, agama, dan ideologi. Diperlukan upaya lebih untuk menyelesaikan jenis konflik semacam ini. Ketika terjadi perang saudara yang dipicu oleh perbedaan-perbedaan yang bersifat *intangible*, maka konflik semacam ini akan mendorong keterlibatan aktor-aktor dari luar yang memiliki kesamaan etnis, identitas, agama atau ideologi. Aktor-aktor eksternal ini akan mendukung salah satu pihak, sehingga terjadilah *proxy war*.

Terjadinya *proxy war* karena konflik identitas dapat dijelaskan dalam kasus demokratisasi di Timur Tengah pada 2011 yang melanda

3 Setelah terjadi “*The Arab Spring*,” dukungan Suriah atas Hamas mengendur karena Hamas berada dalam posisi yang sulit saat Suriah dibawah Bashar al-Assad menindas kelompok-kelompok oposisi di Suriah yang *notebene* mereka ini dari kelompok Sunni yang sama dengan Hamas. Akibatnya markas Hamas di luar negeri berpindah dari Damaskus ke Qatar.

Semenanjung Arab. Salah satu yang merasakan guncangan cukup kuat dari arus revolusi ini adalah Bahrain. Negara monarki ini dipimpin oleh penguasa Sunni yaitu Dinasti Al-Khalifa di tengah-tengah masyarakat Bahrain yang mayoritas Syiah. Kelompok Syiah di negara ini menuntut diakhirinya pemerintahan monarki dan digantikan dengan sistem demokrasi yang memungkinkan komunitas Syiah mendapatkan akses yang lebih besar atas kekuasaan. Pemerintah Iran yang memang identik dengan Syiah berada pada posisi mendukung kelompok oposisi yang menentang Dinasti Al-Khalifa. Pemerintah Bahrain menyoroti pemberitaan dari media-media Syiah seperti Al-Manar stasiun TV milik Hezbollah di Lebanon dan Al-Alam stasiun TV berbahasa Arab milik Iran yang dinilai menghasut Syiah di Bahrain untuk melawan monarki.⁴

Sementara itu, Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya berusaha mempertahankan dominasi kekuasaan Sunni di Bahrain. Dengan kata lain, konflik sektarian Sunni-Syiah di Bahrain memicu campur tangan Saudi-Iran melalui *proxy* di negara tersebut.⁵ Sampai pada akhirnya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) di bawah bendera Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) mengirimkan 2000 pasukan yang terdiri dari 1200 dari Arab Saudi dan 800 dari UEA untuk menertibkan aksi protes dan demonstrasi yang jumlahnya sudah puluhan ribu di kota Manama.⁶ Pemerintah Bahrain dinilai sudah tidak mampu menghadapi keadaan dan aksi demonstrasi sudah mengarah kepada upaya mengganti kekuasaan monarki di negara tersebut. Konflik sektarian di Bahrain berhasil diredam sehingga tidak sampai terjadi perang sipil.

4 Martin Chulov, "Saudi Arabian Troops Enter Bahrain As Regime Asks For Help To Quell Uprising," *The Guardian*, March 14, 2011, <https://www.theguardian.com/world/2011/mar/14/sau-di-arabian-troops-enter-Bahrain>, diakses pada 17 Maret 2017.

5 Simon Mabon, "The Battle for Bahrain: Iranian-Saudi Rivalry", *Middle East Policy*, 2012, Vol. 29, No. 2, (Summer).

6 Ethan Bronner and Michael Slackman, "Saudi Troops Enter Bahrain to Help Put Down Unrest," *New York Times*. March 14, 2011, <http://www.nytimes.com/2011/03/15/world/mid-dleeast/15Bahrain.html>, diakses pada 24 April 2019.

Di tempat yang lain, hal yang berbeda terjadi yaitu krisis di Yaman. Saat itu kelompok Syiah Houthi melakukan pemberontakan bersenjata ketika Presiden Mansour Hadi berkunjung ke Arab Saudi tahun 2015. Koalisi antara Syiah Houthi dan pendukung mantan Presiden Abdullah Shaleh yang digulingkan rakyat Yaman pada saat gelombang "*The Arab Spring*" tahun 2011 mengkhawatirkan Saudi. Penyebabnya adalah Syiah Houthi didukung oleh Iran. Pergerakan pemberontakan Houthi yang terus meluas di wilayah Yaman sampai menguasai ibukota negara, San'a, mendorong Arab Saudi melakukan intervensi dengan mengirimkan pasukan dan melakukan serangan-serangan udara ke posisi-posisi Houthi. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan Presiden Mansour Hadi yang Sunni dan mencegah Houthi yang didukung Iran mengambil alih kekuasaan. *Proxy war* Iran-Saudi di Yaman terus berlangsung sampai dengan saat ini. Persaingan di antara kedua negara tersebut tidak lepas latar belakang identitas yang berbeda diantara keduanya yaitu Sunni dan Syiah yang kalau dilihat dari demografi penduduk Yaman perbandingan jumlah Syiah dan Sunni hampir seimbang dengan posisi Sunni lebih banyak.

Tidak hanya di Bahrain dan Yaman, *proxy war* di antara dua negara ini, yakni Arab Saudi dan Iran, yang juga terlibat dalam perang sipil di Suriah. Gelombang "*the Arab Spring*" yang merembes ke Suriah pada awalnya berupa protes dan demonstrasi jalanan menuntut Presiden Bashar al-Assad mendemokratiskan sistem pemerintahan di Suriah. Namun, Presiden Bashar al-Assad merespon demonstrasi-demonstrasi tersebut dengan tindakan-tindakan represif. Akibatnya, tuntutan publik tidak lagi sebatas perubahan sistem politik yang lebih demokratis, namun sampai pada tuntutan Bashar Al-Assad turun dari kekuasaan, sehingga meletuslah perang sipil antara kekuatan-kekuatan oposisi melawan Bashar al-Assad. Presiden Bashar al-Assad yang berasal dari minoritas Alawi, salah satu sekte dalam Syiah, yang berjumlah sekitar 11 persen dari total penduduk Suriah berhadapan dengan oposisi-oposisi dari kalangan Sunni, yang merupakan sekitar

70 persen penduduk Suriah. Dalam hal ini, posisi Iran dan juga Rusia berada di belakang Presiden Bashar al-Assad, dan sebaliknya posisi Arab Saudi dan negara-negara Sunni lainnya seperti Turki dan Qatar serta Amerika Serikat sebagai penyokong kelompok oposisi (Al-Jazeera, 2016). Tiga contoh kasus di Bahrain, Yaman dan Suriah menunjukkan bahwa perang sipil yang bersinggungan dengan identitas yang bersifat *cross-border* dapat menjadi pemicu munculnya *proxy war* di antara kekuatan-kekuatan dominan di sekitar wilayah konflik.

Faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya *proxy war* di Timur Tengah adalah posisi geografik negara yang dilanda konflik. Kembali ke contoh kasus sebelumnya yaitu krisis di Bahrain dan perang saudara di Yaman, baik Arab Saudi maupun Iran memandang posisi geografik dua negara tersebut sangat penting. Bahrain dan Yaman terletak di Semenanjung Arab, yang bagi Iran adalah posisi yang sangat strategis, karena berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi rival utama Iran di Timur Tengah. Terlebih Yaman, bagi Iran keberadaan negara ini menjadi penting sebagai gerbang masuk ke Laut Merah atau keluar menuju Laut Arab. Garis pantai yang memanjang di jalur tersebut memiliki arti yang sangat strategis. Di satu sisi Iran ingin menanamkan pengaruh di kawasan tersebut, di sisi lain, Arab Saudi berusaha mencegahnya.

Demikian juga bagi Arab Saudi, posisi kedua negara tersebut juga dipandang sangat strategis. Oleh karena itu, keduanya jangan sampai jatuh ke tangan pengaruh negara rivalnya yaitu Iran. Bahrain yang mayoritas penduduknya Syiah, sejak revolusi Islam Iran di bawah Ayatullah Khomeini tahun 1979 menjadi pintu masuk penyebaran ide revolusi di Jazirah Arab umumnya dan Arab Saudi khususnya. Sementara itu, posisi Yaman juga sangat strategis bagi Saudi terkait konsentrasi penduduk Arab Saudi penganut Syiah, sekalipun kecil persentasenya di wilayah barat laut negara itu berbatasan dengan Yaman. Secara umum penganut Syiah di Saudi dibatasi aksesnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik strategis dan demikian

juga dengan akses ekonomi.⁷ “*The Arab Spring*” mendorong mereka untuk menuntut hak-hak yang lebih luas. Ketika Yaman masuk dalam pengaruh Iran, Arab Saudi khawatir penyebaran ideologi Syiah akan semakin meluas yang pintu masuknya melalui kawasan barat laut negara tersebut. Sama halnya dengan Iran, dengan bentang pantai di sepanjang jalur keluar dari Laut Merah ke Laut Arab, jatuhnya Yaman dalam pengaruh Iran akan menjadi ancaman tersendiri bagi Saudi terutama dalam hal lalu-lintas kapal pengangkut minyak yang ada di sisi Laut Merah dan di kawasan Laut Arab. Wilayah sekitar Laut Arab adalah strategis, terutama untuk lalu lintas ekspor minyak Saudi ke kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Dalam kasus perang sipil di Suriah, yang menempatkan posisi Rusia sebagai pendukung utama rezim Bashar al-Assad dan Amerika Serikat sebagai kekuatan yang kontra terhadapnya, juga terlihat pertimbangan geopolitik kedua negara besar tersebut. Rusia berusaha mempertahankan sekutu dekatnya di Timur Tengah, yaitu Suriah di bawah Al-Assad, karena negara ini memiliki pangkalan militer di Latakia yang berada di wilayah Suriah. Keberadaan pangkalan ini sangat strategis untuk mengontrol Laut Tengah. Selain itu, Rusia juga berkepentingan menjaga pembangunan jalur pipa minyak yang membentang dari Iran, Irak dan Suriah, untuk kemudian diekspor ke kawasan Eropa. Sementara itu, kepentingan geopolitik AS ingin melihat jatuhnya rezim Al-Assad jatuh yang Syiah, lalu digantikan rezim Sunni, sehingga akan memuluskan pembangunan pipa minyak yang di-*back up* AS, dengan rute Qatar, Arab Saudi-Yordania-Suriah-Turki, lalu, untuk selanjutnya masuk ke Eropa. Proyek yang sementara ini berjalan adalah jalur pipa yang didukung Rusia yang rutenya secara umum melewati negara-negara di bawah kendali penguasa Syiah (Antara, 2016). Potensi jatuhnya rezim Bashar al-Assad lebih besar

⁷ John R. Bradley, *Saudi Arabia Exposed Inside a Kingdom in Crisis*. New York: Palgrave Macmillan, 2005:77.

mengingat kelompok Alawi adalah minoritas dibandingkan dengan Irak dan Iran yang mayoritas Syiah.

Hal lain yang memicu keterlibatan aktor-aktor eksternal ketika terjadi konflik di Timur Tengah adalah keberadaan sumber daya alam terutama minyak. Seperti dijelaskan di bagian-bagian sebelumnya, maneuver Saudi-Iran di Yaman ataupun keterlibatan AS dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah dan Rusia bersama-sama dengan Iran di Suriah, tidak lepas dari upaya untuk mempertahankan akses atas sumber daya alam minyak di kawasan Timur Tengah. Potensi minyak di Timur Tengah sangat besar. Enam negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk, yang terdiri dari Saudi Arabia, Kuwait, UEA, Qatar, Oman, dan Bahrain, memiliki sumber daya minyak yang jika digabung mencapai 45,5 persen dari cadangan minyak dunia. Apabila ditambahkan Irak dan Iran, lebih banyak lagi, mencapai 64,7 persen cadangan minyak dunia.⁸

Tentu banyak pihak yang berkepentingan dengan sumber daya alam ini. Sebagai konsekuensinya, ketika terjadi pergolakan di kawasan tersebut banyak pihak yang berkepentingan untuk ikut terlibat, agar tidak dirugikan ketika terjadi pergolakan, atau berusaha mendapatkan keuntungan dari pergolakan itu sendiri. Kendatipun Yaman dan Suriah bukan penghasil utama minyak, namun dua negara tersebut memiliki posisi yang sangat strategis untuk mengamankan jalur-jalur perdagangan minyak. Persaingan dalam rangka mengamankan pasokan energi di negara-negara yang sedang membangun industrinya menjadi faktor pemicu keterlibatan negara luar dalam dinamika konflik di Timur Tengah. Sebagai contoh, Jepang, pada waktu terjadi Perang Teluk, untuk mengusir Irak dari Kuwait awal tahun 1990-an, tidak terlibat secara langsung dalam pasukan multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Negara ini hanya memberikan bantuan kemanusiaan. Akibatnya Jepang tidak

⁸ S. Peters, "Coercive Western Energy Security Strategies: "Resource Wars" as a New Threat to Global Security", *Geopolitics*, 2004, Vol. 9 No. 1.

mendapatkan perhatian lebih dari negara-negara di kawasan Teluk, khususnya Kuwait, pasca-pembebasannya dari Irak. Tidak ada ucapan terima kasih dari Emir Kuwait terhadap Jepang, dan juga Jepang tidak menjadi prioritas dalam ekspor minyak Kuwait.⁹ Ini memberikan pengalaman buruk bagi Jepang, sehingga ketika terjadi Perang Teluk 2003 untuk menurunkan Saddam Hussein dari kekuasaannya, Jepang ikut melibatkan SDF (Self Defence Forces) untuk mengurus urusan-urusan rekonstruksi Irak pasca Perang (Hiwatari, 2005:51).

Jadi, *proxy war* terjadi di negara-negara dunia ketiga yang secara politik masyarakatnya tersegregasi sedemikian rupa sehingga terjadi konflik di antara mereka. Di hampir semua negara yang mengalami *proxy war* di Timur Tengah terjadi di wilayah yang masyarakatnya terpecah atas dasar identitas dan kesukuan dan diawali dengan munculnya gerakan massa yang menuntut hak atas apa yang seharusnya mereka dapatkan. Jalinan kepentingan politik, ekonomi, geostrategi dan perluasan pengaruh dari berbagai aktor baik di regional kawasan maupun di luar kawasan menjadikan konflik itu tidak hanya bersifat domestik, namun sudah bersifat lintas batas negara. Dengan kata lain, konflik yang terjadi di Suriah dan Yaman sampai dengan saat ini tidak dapat disederhanakan sebagai konflik domestik dan persaingan antara Sunni dan Syiah saja. Namun, yang jelas, konflik tersebut sudah menjadi tragedi kemanusiaan saat ratusan ribu jiwa meninggal akibat konflik dan jutaan lainnya menjadi pengungsi. Akibat kondisi semacam ini, masyarakat internasional menjadi harus bertanggung jawab untuk membantu mengakhiri konflik tersebut.

9 P. Midford, "Japan's Response to Terror: Dispatching the SDF to the Arabian Sea," *Asian Survey*, 2003, Vol. 42, No. 2, March/April: 329-351.

Bibliografi

- Aljazeera, 2016. "Suriah's Civil War Explained from the Beginning". <http://www.aljazeera.com/news/2016/05/Suriah-civil-war-explained-16050841199-66.html>, diakses 24 April 2019.
- Al Zanzadi, Ahmed A. 2015. "Yemen's Question: From the Struggle for Freedom to the Struggle for Survival," *Turkish Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 2, No. 2, 97.
- Antara, 2016. "Geopolitik dan Perang Dunia Terselubung di Suriah". <https://www.antaranews.com/berita/585522/geopolitik-dan-perang-dunia-terse-lubung-di-suriah>, diakses 25 April 2019.
- Bradley, John R. , 2005. *Saudi Arabia Exposed Inside a Kingdom in Crisis*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bronner, Ethan, & Michael Slackman, Michael, 2011. "Saudi Troops Enter Bahrain to Help Put Down Unrest," *New York Times*. March 14, <http://www.nytimes.com/2011/03/15/world/middleeast/15Bahrain.html>, diakses pada 24 April 2019.
- Chulov, Martin, 2011. "Saudi Arabian Troops Enter Bahrain As Regime Asks For Help to Quell Uprising," *The Guardian*, March 14, <https://www.theguardian.com/world/2011/mar/14/saudi-arabian-troops-enter-Bahrain>, diakses pada 17 Maret 2017.
- Drysdale, A. dan G. H. Blake. 1985. *The Middle East and North Africa: A Political Geography*. New York: Oxford University Press.
- Halliday, Fred. 2005. *The Middle East in International Relations: Power, Politics and Ideology*.
- Goldstein, J. S. 2006. *International Relations*. 7th Edition. New York: Pearson Longman.
- Hiwatari, N. 2005. "Japan in 2004: 'Courageous' Koizumi Carries On," *Asian Survey*, Vol. 45, No. 1, January/February: 41-53.
- Mabon, Simon. 2012. "The Battle for Bahrain: Iranian-Saudi Rivalry", *Middle East Policy*, Vol. 29, No. 2, (Summer).

- Mclaughlin, Elizabeth dan Luis Martinez. 2019. "The US Role in Yemen: What You Need to Know", <https://abcnews.go.com/International/us-role-yemen/story?id=427800-04>, diakses pada 26 September.
- Midford, P. 2003. "Japan's Response to Terror: Dispatching the SDF to the Arabian.
- Peters, S. 2004. "Coercive Western Energy Security Strategies: "Resource Wars" as a New Threat to Global Security", *Geopolitics*, Vol. 9 No. 1. Sea," *Asian Survey*, Vol. 42, No. 2, March/April: 329-351.

Indeks

- Abdul Majid al-Zindani, 222
Abdullah bin Hussein al-Ahmar, 222
Abdullah Saleh, 222
Abha, 104
Abqaiq, 132, 229
Abu al Abbas, 209
Abu Bakr al-Baghdadi, 52
Abu Dhabi, 113
Aden, 4, 106, 203, 206, 209, 217,
218, 230
AFRICOM, 117
agama, 6, 11, 21, 74, 168, 215, 224,
241
Ahmed A. Al Zandani, 213, 214, 215
aksi kekerasan, 39, 89, 94, 100, 124,
133, 195, 198, 205, 210
aksi militer, 33, 53, 75, 90, 98, 117,
143, 144
aktor negara, 18, 19
ktor utama, 107, 135, 239
Alawi, 243, 246
Ali Abdulah Ayoub, 58
Ali Abdullah Saleh, 204, 205, 216,
218, 220, 222, 227
Ali Abdulah Ayoub, 58
Ali Salim El-Beidh, 218
Aliansi al-Fath, 46
aliani internasional, 44
Aliansi Muslim, 103
Al-Bukamal, 58
Al-Qaeda, 30, 31, 33, 40, 41, 116,
209,
Al-Qaim, 58
Al-Udaid, 4
alutsista, 22, 51, 130
Al-Walid, 58
Amerika Serikat (AS), 12, 24, 29, 31,
174, 183, 227, 240
Amin, 73
aneksasi, 56, 63, 92
Angela Merkel, 128
angkat senjata, 3, 19
Anshar al-Sharia
anti-demokrasi, 116, 124, 139
anti-pemerintah, 19, 137, 216
Antonio Guterres, 48, 89, 114
AQAP,
The Arab Spring, 1, 2, 34, 49, 84,
111, 137, 139, 143, 199, 202,
211
Aramco, 103, 108, 119, 191
Ashraf Ghani, 33, 35, 40
Asia Baratdaya, 11
Asia Kecil, 28
Asia Selatan, 14
Asia Tenggara, 14, 245
Ayatullah Khomeini, 244

Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS),
Baghdad, 47, 48, 58, 77, 125
Bahrain, 4, 35, 60, 89, 237, 242
balance of power, 64
bantuan finansial, 18
Bashar al-Assad, 52, 53, 58, 60, 243,
245
Basyir, 73

Indeks

- Bayt Al Ahmar, 221
Beirut, 3, 57
Ben Waallace, 129
Benghazi, 111, 112, 116, 119
Benjamin Netanyahu, 61, 63, 85, 87,
91, 94
biaya manusiawi, 26, 42
biaya operasional, 19
Black September, 169
blokade, 4, 5, 35, 207
blokade total, 35
boikot, 89, 216
Boris Johnson, 129
Bosporus, 171
British Petroleum (BP), 127
British Heritage, 127
Bulan Sabit Syiah 3, 57, 60, 77, 79,
125, 142
Bush Jr., 41
- Cina, 141
civil war, 34, 162, 194, 195, 198,
199, 211
collateral damage, 26, 101
- Damaskus, 3, 57, 58, 60, 74, 77, 81,
125
dampak brutal, 26
Dan Kurtz, 131
Dataran Tinggi Golan, 61, 62, 86, 87
deadlock, 36
deal of century, 92
demokratisasi, 123, 139, 146, 201,
237, 241
Derna, 119
destroyer, 128
Dewan Kerjasama Teluk, 205
Dewan Politik Tertinggi, 207, 216
Dewan Transisi Selatan, 4
Dhahran, 35
dilema keamanan, 27
Dinasti al-Khalifa, 217, 218
DK-PBB, 43, 113
domestik, 114, 135, 136, 138, 161,
200, 214, 227, 237, 247
Dostum, 31
drone, 42, 82, 103, 104, 107, 109,
120, 122, 128, 132
Druze, 72
- Ehud Goldwasser, 163
*Extractive Industries Transparency
Initiative* (EITI), 198
eksperimen demokrasi, 21
Eldad Regev, 163
eliminasi, 40, 54, 92
embargo, 43, 77, 125, 138, 141, 240
Emile Durkheim, 21
Emir Kuwait, 247
Emmanuel Macron, 112
energi, 1, 42, 44, 115, 144, 167
Erg Masjedi, 45
Eritrea, 238
Eropa Barat, 14
eskalasi, 29, 46, 74, 82, 89, 95, 102,
105, 120, 125, 131
Ethiopia, 238
- F-35, 47
Faksi, 6, 33, 49, 74, 78, 238
fascist, 23
Fatah, 241
Fayez al-Sarraj, 96, 97, 98
Gerakan Pembebasan Patriotik (Free
Patriotic Movement-FPM), 59,
74, 76
friksi, 32, 34, 137
Front al-Nusra, 50
FTFs, 117

- G-7, 116, 118, 131
Garda Revolusi, 29, 30, 77, 126
garis keras, 32, 73, 89, 131
 Muammar al-Gathafi/Moammar
 Khadafi, 28, 142
Gulf Cooperation Council (GCC), 205,
 214
Gedung Putih, 88, 125
gelar militer, 60
gelombang kekerasan, 94, 124
Gemayel bersaudara, 73
gencatan senjata, 13, 94, 99, 102,
 181, 208
genosida ganda, 52
geografik, 11, 246
geopolitik, 11, 13, 19, 56, 166, 171
geostrategi, 247
Gerakan al-Ikhwân al-Muslimûn
 (Moslem Brotherhood/MB),
 197
Gerakan Amal, 59, 76
Global Hawk, 122
GNA, 7, 114, 115
Golan Height Law, 61
GPC (Kongres Rakyat Umum), 220
Grace 1, 126
Growth Domestic Product (GDP), 1
Gulf States Initiatives, 213
- Hadi al-Amiri, 46
Hamas, 86, 88, 89, 92, 93, 139
Hamid Karzai, 31
Hammas, 6
hard power, 21
Hari Nuklir, 30
Hasd Saabi, 47
Ḥasan al-Bannā, 221
Hashid al-Shaabi, 6, 45
Hassan Rouhani, 30, 114
Hafez al-Assad, 29, 63, 74
- hegemoni, 136, 140, 144
Heiko Mass, 128
Hezbollah, 2, 10, 24, 59, 73, 75, 81,
 142, 162, 163, 174, 175, 179,
 180, 182, 230
Hirak, 214, 217
Horn of Africa (HOA), 127
Hodeidah, 99, 102
Houthi, 3, 100, 102, 104, 108, 132,
 191, 199, 205, 206, 209, 215,
 216
hubungan tradisional, 25
hukum internasional, 92, 100, 108,
 166
Human Rights Watch, 230
- Ibnu Khaldun,
Ibrani, 11
Ikhwanul Muslimin, 2, 4, 7, 34, 144,
 229
Imam Dua belas, 216
impor energi, 43
infrastruktur, 3, 179
infrastruktur negara, 26, 44
Inggris, 4, 5, 23, 29, 41, 74, 91, 105,
 107, 126, 129, 130, 203, 218
inisiasi damai, 13
inisiatif diplomatik, 128
instabilitas berkepanjangan, 22
Intangible, 241
intelijen, 18, 31, 32, 60, 80, 128, 228
International Red Cross (IRC), 108
intervensi, 15, 20, 25, 29, 41, 46, 55,
 59, 93, 98, 135, 138, 169, 173,
 199, 206, 211, 227, 240, 241
intervensi militer, 25, 27, 42, 55, 206
Iran Revolution Guard Corps (IRGC),
 30, 122, 126
Iron Dome, 94
Islamic States in Iraq and Suriah
 (ISIS), 2, 30, 37, 41, 44, 51, 52,

Indeks

- 57, 59, 64, 68, 70, 115, 117
Islam, 11, 14, 31, 40, 52, 95, 97, 115,
136, 168, 169, 174, 180, 216
Ismailiyah, 74
isolasi, 54, 56, 76, 79, 88, 125, 138
isu nuklir, 15, 79
Italia, 7, 23, 29, 91, 112, 114, 115
Jahudi, 11
Jalur Gaza, 6, 7, 89, 93, 94
Jamal Kashoggi, 97
Jared Kushner, 88
Jazirah Arab, 94, 99, 133, 244
Joint Comprehensive Plan of Action
(JCPOA), 5, 129
Jerman, 5, 23, 43, 44, 68, 91, 128,
133
Jerusalem, 22, 61, 85, 87
Jihad Islami, 6, 95
John Bolton, 120
- Kabul, 31, 33, 35, 37, 39
Kazakhstan, 64, 166
keamanan domestik, 37, 41, 50, 69
keamanan militer, 38
Kebangkitan Arab, 202
kecaman internasional, 20, 182
kejahatan genosida, 103
kekaisaran otokrat sedunia, 116
kekuatan, 2, 13, 21, 24, 29, 44, 56,
64, 93, 105, 119, 141, 161, 167,
171, 176
adidaya, 71
asing, 15, 60, 124, 136, 162, 164,
198
Barat, 55
domestik, 136
Hezbollah, 76, 179, 183
Iran, 59, 76, 89, 139, 175
Islam radikal, 2
kombatan, 22
militer, 19, 26, 80, 95, 122, 130,
179, 181
oposisi, 237, 238, 243
pihak yang berkonflik, 13, 16
Politik, 45, 75, 80, 124
regional, 28, 78, 97, 135, 227
Syiah, 141
Taliban, 39, 40
kelaparan, 3, 99, 210
kepentingan nasional, 15, 23, 26, 29,
57, 70, 102, 107, 136, 166
“kesepakatan abad ini”, 7
Khalifa Haftar, 112, 113, 115, 116,
117, 142
Khmeimim, 3
Khurais, 108, 132, 229
kilang minyak, 108, 109, 132, 229
Kimberly process, 197
koalisi Barat, 28, 29, 32, 64, 145
koalisi internasional, 39, 118
Kolonialisme, 13, 18, 23, 63
Komando Sentral Militer, 122
kombatan, 19, 20, 22, 42, 102
kompleksitas, 138, 162, 189, 193,
232
konfigurasi kekuatan, 13, 145
konflik, 1, 6, 9, 11, 26, 28, 30, 33, 36,
39, 63, 89, 95, 102, 109, 117,
136, 145, 161, 163, 165, 168
antar-komunitas, 195
berkepanjangan, 26, 32, 36
bersenjata, 27, 111, 130, 143,
199
domestik (internal), 59, 73, 75,
102, 105, 135, 140
internasional, 52
militer, 31, 41, 80
Konflik Arab, 174, 175
Konflik Bashar, 52
Konflik Gaza, 94
Konflik Lebanon, 159
Konflik Palestina, 90, 95, 138
Konflik Suriah, 67

Proxy War di Timur Tengah

- Konflik Yaman, 97, 99, 107, 144, 189, 194, 197, 200, 210, 213, 223
Kongres AS, 97, 125
konstelasi, 13, 29, 67, 95, 135
 kekuatan, 16, 29, 44, 64, 105
 politik, 78, 80
kontestasi kekuatan, 29, 80, 137, 141, 164
kontraproduktif, 25, 56, 62, 85
kontrol kekuasaan, 55
Kora Allepo, 53
Kota Nur Sultan, 64
Kubu 8 Maret, 80
Kubu 14 Maret, 80
kudeta, 32, 56, 69, 107, 116, 142, 195, 220
Kurdi, 2, 6, 28, 42, 50, 53, 59, 65, 66, 169
Kuwait, 48, 59, 60, 62, 79, 87, 89, 166, 221, 237, 241, 246
- Lahaj, 103
Laut Caspia, 11
Laut Hitam, 11
Laut Marmara, 171
Laut Mati Utara, 91
Laut Mediterania, 171
Laut Merah, 207
Laut Tengah, 245
Lebanon Forces, 80
Lembaga Amil Zakat, 12
LembahYordan, 91
Levant, 11, 52, 58, 117
Liga Arab, 74, 80, 240
Libyan National Army (LNA), 112
Loya Jirga, 35
luar kawasan, 12, 16, 24, 140, 146
- Macedonia, 28
Mahmoud Abbas, 6
Manama, 242
Mansour Hadi, 99, 101, 102, 105, 214
Maroko, 112, 237
Marwan Muasher, 202
masyarakat sipil, 124, 211
Max Weber, 3, 20
Mazar-i-sharif, 31
Mediterania, 11, 54, 73
Menachem Begin, 61
Michael D. Andrea, 131
Michel Aoun, 81
MIG, 53
Mike Pence, 131
Mike Pompeo, 131
misi keamanan maritim, 129
misil, 55, 101
Mohammad Bagheri, 57
monoteis, 11
Moqtada al-Sadr, 46
Moslem Brotherhood, 221
Mount Lebanon, 174
Muammar al-Qaddafi/Moammar Khadafi, 95, 142
mullah, 4, 5, 30, 56, 73, 77, 86, 93, 139, 143, 230
Multifactional wars, 33
Muqtada al-Sadr, 6, 49
Nangarhar, 37
- National Security Council (NSC), 120, 122
NATO, 56, 62, 68
National Dialogue Conference (NDC), 205, 213
negara marjinal, 116
non-kombatan, 52, 54
non-negara, 18, 20, 23, 27, 31, 41, 144
non-pemerintah, 101, 210

Indeks

- Barack Obama, 25, 52, 55, 62, 86
Occupied territory, 86
Oman, 62, 87, 89, 206
operasi militer, 3, 19, 20, 32, 39, 45,
52, 71, 79, 199
Operation Peace for Galilee, 178
oposisi, 58, 205, 230, 237, 238
Osama bin Laden, 31, 32
Osman al-Ghani, 58
Ottoman, 23, 203
- Palang Merah Internasional, 108
Palestina, 6, 7, 11, 16, 24, 75, 79, 85,
87, 88, 90, 94, 138, 161, 176,
241
Parsi, 28
Partai Islah (Al Islah), 209, 217, 222
Partai Kataeb, 80
Partai Pekerja Kurdistan, (PKK), 3
Partai Sosial al-Henchag, 3, 69
Pashtun, 28
pasukan koalisi, 32, 39, 98, 103, 105,
144, 167
patron, 32, 43, 79
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
7, 13, 14, 25, 30, 40, 43, 76, 94,
99, 112, 115, 143, 162, 170,
184, 207
peace spoiler, 37, 64, 73
Pemberontakan Arab, 202
Pemerintah Keselamatan Nasional,
207
pemerintah kolonial, 21, 23, 143
pemerintahan transisional, 112, 115,
141
pemukiman ilegal, 92, 96
pendekatan berotot, 131
pendekatan multilateralisme, 27
penduduk sipil, 66, 75, 141, 163
pendudukan, 18, 21, 39, 86, 91, 114
pendudukan Israel, 91
Pengawal Republik, 215, 219
penjajahan, 18, 239
peperangan, 19, 181, 197
perang, 3, 4, 6, 18, 19, 21, 26, 30, 33,
36, 41, 44, 70, 81, 94, 97, 102,
108, 120, 126, 128, 136, 144,
177, 196, 200, 206, 227
generasi ketiga, 22
konvensional, 18
saudara, 20, 33, 37, 75, 99, 114,
117, 161, 180, 195, 197, 241
sipil, 23, 25, 46, 73, 99, 195, 238
terbatas, 18, 94
total, 18
tradisional, 18
Perang 1967, 87, 92
Perang Dingin, 24, 42, 55, 56, 97,
135, 178, 199, 237
Perang Dunia I, 23
Perang Dunia II, 11, 24, 137, 238
Perang Salib, 22
Perang sipil Spanyol, 23
Perang Teluk I, 167, 221
Perang Yom Kippur, 61
perbatasan, 18, 43, 51, 58, 65, 67,
70, 79, 95, 102, 106, 192, 200
perdamaian dunia, 14, 30
Perjanjian damai, 36, 241
Perjanjian Nuklir, 43
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
14, 25, 30, 40, 76, 89, 92, 99,
101, 108, 118, 143, 162, 170,
192, 207, 213
Pervez Musharraf, 31
Phalangist, 74
PLO, 84, 169, 177, 241
Politik Regional, 46
Poros Astana, 3
Poros Perlawanan, 1, 5, 6
Poros Kontrarevolusi, 1, 2, 3, 5, 7
poros pro-perubahan, 2, 5, 7
power vacuum, 204

- pragmatis, 15, 40, 67, 91
Prancis, 4, 5, 29, 68, 74, 84, 91, 107,
112, 115, 129, 131, 161
pro-demokrasi, 52, 53, 56, 77, 136
pro perubahan, 136
proses tringulasi, 17
Protracted wars, 12
proyek geopolitik, 57
psywar, 122
Public Account Committee, 88
- Qatar, 2, 5, 34, 56, 62, 87, 89, 115,
118, 124, 135, 198, 241
Qaumiyya, 239
Quds, 81
- Rafiq al-Hariri, 74
Raja Hussein, 169
Raqqa, 54, 63
Redeployment Coordination
Committee (RCC), 208
Recep Thayyib Erdogan, 54, 59, 66,
68, 71, 139
represif, 49, 52, 70, 88, 138
resolusi, 7
resolusi konflik, 13, 15, 17, 23, 82,
141, 197
Revolusi Arab, 202
Revolusi Iran, 29, 30, 75, 168
rezim boneka, 39
rezim nasional, 28, 29, 58
Riyad al-Maliki, 79
Riyadh, 6, 105, 207
rogue states, 116
rudal balistik, 5, 47, 109, 207
Rusia, 1, 2, 24, 29, 53, 54, 56, 60, 63,
70, 115, 118, 135, 138, 167, 245
- Saad al-Hariri, 79, 80, 81
- Saddam Hussein, 28, 29, 41, 43, 46,
49, 57, 59, 60, 76, 247
Sana'a, 106
sanksi embargo, 43, 125
sektarianisme, 20, 50, 138
Self Defence Forces (SDF), 247
Selat Bab el-Mandeb, 4
Selat Dardanella, 171
Selat Hormuz, 48, 103, 104, 106,
127, 129
Semenanjung Arab, 127
senjata biologi, 54
senjata kimia, 52, 54
separatis, 4, 6, 20, 51, 204
separatisme, 69
serangan militer, 32, 51, 52, 66, 67,
71, 75, 81, 100, 108, 126, 175
serangan terorisme, 31, 39, 124, 145
Syiah (Shiah), 1, 3, 34, 41, 42, 44, 56,
57, 59, 73, 81, 84, 86, 124, 131
'sindrome Vietnam', 25
Sirte, 111
Status of Forces Agreement (SOFA),
46
solusi damai, 21, 35, 36, 66
solusi dua negara, 85, 91
South Lebanon Army (SLA), 179
southern movement, 217
Spanyol, 23, 91
Southern Transitional Council
(STC), 217, 229
Stockholm Agreement, 208
Sulaiman Franjieh, 74
sumber daya alam, 11, 19, 29, 115,
136, 165, 196, 246
Sunni, 6, 31, 41, 50, 57, 84, 87, 89,
95, 102, 103, 137, 169, 183, 215
Suriah Democratic Forces (SDF), 52,
53, 57, 67, 247
Swedia, 102, 123
Syiah, 1, 3, 6, 34, 42, 44, 46, 56, 73,
78, 82, 84, 124, 136, 140, 141,

Indeks

- 168, 205
- Tartus, 3
- Timur Tengah, 1, 16, 21, 24, 28, 30,
34, 35, 42, 45, 49, 59, 62, 64, 68,
72, 76, 79, 81, 85, 93, 97, 102,
118, 122, 135, 140, 165, 182,
199, 237, 239, 240
- Turki, 3
- 103, 105, 144, 191, 198, 199,
200, 203, 204, 205, 207, 209,
222, 224, 227
- Yasser Arafat, 221
- Yassin Abdulaziz, 198
- Yordania, 1, 4, 7, 47, 57, 89, 102, 139,
221
- Zalmay Khalilzad, 35
- Vladimir Putin, 53, 55, 70, 116
- Yaman, 11, 33, 87, 97, 99, 100, 102,

Tentang Penulis

Mochamad Ilyas, Tenaga Ahli Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI 2014-2019.

M. Muttaqien, Ph. D., pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, dapat dihubungi di email: m. mutta-qien@fisip.unair.ac.id.

Poltak Partogi Nainggolan, Prof. Dr. phil., *research professor* untuk masalah-masalah politik, keamanan dan hubungan internasional di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRRI. Menyelesaikan program doktoral ilmu politik dan studi kawasan di *Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg*, Jerman, tahun 2011. Publikasi buku terkini antara lain *Ancaman ISIS di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018 dan *Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara*, Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019; dapat dihubungi di alamat email: pptogin@yahoo.com dan partogi.nainggo-lan@dpr.go.id.

Simela Victor Muhamad, Drs, M. Si, Peneliti Bidang Isu-Isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRRI. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada 1986, dan Pasca Sarjana (S2) Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia, pada 1999. Bekerja memberikan dukungan materi terkait dengan Isu-Isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik kepada Anggota DPRRI, baik untuk keperluan Rapat-rapat Kerja

Tentang Penulis

dengan Pemerintah maupun untuk keperluan menghadiri sidang-sidang keparlemenan internasional.

Smith Alhadar, pakar masalah-masalah Timur Tengah dan penasehat pada the Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) dan juga Staf Ahli untuk Institute for Democracy Education, Jakarta.